

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu menggunakan dua penelitian yaitu penelitian yang pertama dilakukan Petri (2012) mengenai analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Governance* pada laporan tahunan dan penelitian yang kedua dilakukan oleh Darmawati (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan faktor regulasi terhadap kualitas implementasi *Good Corporate Governace*. Berikut penjelasan 2 penelitian terdahulu :

1. Pada penelitian sebelumnya yang pertama dilakukan oleh Petri (2012) mengenai analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Governance* pada laporan tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Governance* dalam laporan tahunan.

Tabel 2.1
Ringkasan hasil penelitian terdahulu

Nama peneliti	Judul Penelitian	Data	Variabel
Petri Natalia (2012)	Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan <i>Corporate Governance</i> pada laporan tahunan	Perusahaan yang terdaftar dibursa efek antara tahun 2010-2011 dengan 45 sampel	Komite audit Ukuran perusahaan Profitabilitas Leverage Klasifikasi industri

		perusahaan	
--	--	------------	--

Pada penelitian ini semua variabel berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Governance*. Hal ini disebabkan keputusan mengenai luas pengungkapan maupun item-item pengungkapan apa saja yang akan diungkapkan perusahaan lebih didasarkan pada pertimbangan strategis manajemen, bukan karena semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Serta karena adanya kemampuan dari beberapa variable tersebut yang memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pengungkapan *Good Corporate Governance* dalam laporan tahunan. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan mengalami penurunan, perusahaan akan cenderung memberikan informasi lebih tentang pengungkapan *Good Corporate Governance* untuk menghadapi tekanan pasar dan meyakinkan pasar akan kinerja perusahaan pada periode mendatang (Kusumawati, 2007).

2. Pada penelitian sebelumnya yang kedua dilakukan oleh Darmawati (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan faktor regulasi terhadap kualitas implementasi *Good Corporate Governace*.

Tabel 2.2
Ringkasan hasil penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul penelitian	Data	Variabel
Deni Darmawati (2006)	Pengaruh karakteristik perusahaan dan	53 perusahaan yang terdaftar di bursa efek	Kesempatan investasi Konsentrasi kepemilikan Leverage perusahaan

	factor regulasi terhadap kualitas implementasi <i>corporate governance</i>	indonesia tahun 2003-2004 yang masuk dalam pemeringkatan IICG	
--	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu menjelaskan variasi kualitas implementasi *Good Corporate Governace* perusahaan publik di Indonesia.

Sampel perusahaan terdiri dari berbagai jenis industri yang dikategorikan menjadi perusahaan yang masuk dalam industri bank dan non bank dan juga dikategorikan ke dalam jenis perusahaan BUMN dan non BUMN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan BUMN dan non BUMN mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governace*. Variabel konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas *Good Corporate Governace* perusahaan. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap implementasi *Good Corporate Governace*, sedangkan jenis perusahaan BUMN dan non BUMN justru berpengaruh negatif terhadap implementasi *Good Corporate Governace*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Karakteristik Perusahaan

Menurut Darmawati (2006) karakteristik perusahaan merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi perusahaan dan memberikan suatu dasar pemilihan tentang berbagai ciri yang ada pada perusahaan. Menurut Almia (2006) karakteristik perusahaan merupakan ciri dan sifat yang ada pada setiap perusahaan yang mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. dividen, size, leverage, kesempatan investasi dan profitabilitas. Karakteristik perusahaan yang dibahas disini adalah menyangkut kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, profitabilitas dan klasifikasi industri.

2.2.1.1 Kesempatan Investasi

Menurut Hanafi (2003) investasi merupakan aktivitas perusahaan yang mempunyai perencanaan yang kritis, investasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai perusahaan yang berarti kemakmuran pemegang saham.

Menurut Tandelilin (2001) ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan sebagai usaha untuk menghemat pajak. Alasan seseorang melakukan investasi yaitu produktivitas seseorang yang telah mengalami penurunan, tidak menentunya lingkungan perekonomian sehingga memungkinkan suatu saat penghasilan jauh lebih kecil dari pengeluaran dan kebutuhan-kebutuhan yang cenderung mengalami peningkatan.

Sunariyah (1997; 2) menyatakan bahwa investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu

lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Secara umum investasi dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Investasi yang dilakukan dalam bentuk sekuritas, seperti surat-surat berharga, deposito atau tabungan.
2. Investasi yang dilakukan dalam bentuk *asset riil*, seperti gedung, tanah, kendaraan atau emas.

Menurut Senduk (2004) bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain:

- Tabungan di bank
Dengan menyimpan uang ditabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan.
- Deposito di bank
Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan, bedanya dalam deposito tidak mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank dalam jangka waktu tertentu.
- Saham
Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tertentu. Dengan membeli saham, berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut dengan deviden.

Dari definisi di atas mengarah pada suatu kesimpulan bahwa investasi merupakan kegiatan penanaman modal perusahaan yang dilakukan dengan pembelian asset pada saat ini, baik berupa asset keuangan, *asset* fisik dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang.

Perusahaan yang dimiliki kesempatan investasi yang tinggi pada umumnya membutuhkan dana eksternal untuk melakukan ekspansi, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam penerapan *Good Corporate Governance*, dalam rangka untuk menurunkan biaya modal. Perusahaan yang memiliki kemampuan berinvestasi akan lebih *profitable* yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja yang baik pada perusahaan (Wardani; 2008).

2.2.1.2 Konsentrasi Kepemilikan

Menurut istilah konsentrasi dan kepemilikan menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Sedangkan kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Jadi konsentrasi kepemilikan yaitu suatu pemikiran yang mengatur hak atau milik setiap pribadi.

Perusahaan memiliki kemampuan untuk bertahan apabila terdapat pemisahan antara pemilik dan pengendalinya. Hal ini sesuai dengan penelitian Fama dan Jensen (1983) yang menganalisis bahwa organisasi yang mampu bertahan tidak berdasarkan pengambilan keputusan pada pemegang saham yang terbesar, tetapi terdapat pemisahan antara pemilik dengan pengendali.

Konsentrasi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan terdiri atas kepemilikan saham sebagai pemilik saham di anggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi (Astuti; 2004). Jika manajer perusahaan yang tingkat kepemilikannya terhadap perusahaan tersebut tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan diskresi terhadap sumber daya perusahaan akan berkurang. Konsentrasi kepemilikan terjadi pada suatu negara sangat tergantung pada keseimbangan antara penegakan hak-hak kepemilikan oleh negara dan pemilik perusahaan (Claessens dkk. 2000). Jika dalam suatu perekonomian pemerintah tidak bisa secara efektif menegakkan hak-hak kepemilikan, maka penegakan hak-hak tersebut akan didominasi oleh pemilik. Pemilik akan mempengaruhi sejauh mana kontrak perusahaan akan dilaksanakan karena hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan dan insentif pemilik untuk mempertahankan hak-hak mereka.

2.2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2001) bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Sedangkan Menurut Michelle & Megawati (2005) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profit*) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan.

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut.

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin. Oleh karena itu profitabilitas merupakan gambaran kinerja perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Muhamad et al. (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Informasi ini digunakan untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut.

2.2.1.4 Klasifikasi Industri

Klasifikasi industri sering diidentikkan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (*manufacturing*). Padahal pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya

produktif dan komersial. Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas, maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin pula sifat kegiatan dan usaha tersebut.

Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya.

2.2.2 Pengertian Corporate Governance

Sebelum membahas mengenai *Corporate Governance*, perlu memahami terlebih dahulu definisi *Corporate Governance*. Beberapa definisi *Corporate Governance* antara lain menurut Sadikan (2006) menyatakan secara umum *Corporate Governance* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kredit, pemasok, asosiasi bisnis, pekerja pemerintahan dan masyarakat luas. Menurut Ken (2003) *Corporate Governance* pada dasarnya menyangkut masalah siapa yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan mengapa

harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi. Sedangkan menurut Shleifer and Vishny (1997) menyatakan bahwa yang menyatakan *Corporate Governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam.

Berdasarkan pengertian dari *Corporate Governance* tersebut, aspek kunci dari *Corporate Governance* adalah membangun secara legal agar tercapai praktik *Corporate Governance* yang bermanfaat bagi perusahaan serta perekonomian.

2.2.2.1 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Seiring dengan tumbuhnya perekonomian global, tumbuh pula kesadaran untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip *Corporate Governance*. Semua negara kini berkepentingan untuk memperbaiki cara perusahaan-perusahaan mereka bekerja. Menurut Mintara (2008) prinsip-prinsip OECD menyangkut lima bidang utama :

1. Hak-hak pemegang saham (*stakeholders*) dan perlindungannya.
2. Peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
3. Pengungkapan yang akurat dan tepat aktu serta transparansi sehubungan dengan struktur operasi korporasi
4. Tanggung jawab dewan (Dewan Komisaris maupun Direksi) terhadap perusahaan

5. Pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya atau secara ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai perlakuan yang setara (*equitable treatment atau fairness*), transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.

Prinsip-prinsip diatas terkait dengan permasalahan yang dihadapi dunia usaha pada umumnya yakni masalah korupsi dan ketidakjujuran, tanggung jawab sosial dan etika korporasi. *Forum for Corporate Governance ini indonesia (FCGI)* sebuah organisasi profesional non-pemerintahan yang bertujuan mensosialisasikan praktik *Good Corporate Governance* menjabarkan prinsip-prinsip diatas sebagai berikut:

1. ***Fairness (kewajaran)***

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa transaksi yang melibatkan informasi orang dalam, penipuan, KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, akuisisi atau pengambilan perusahaan lain.

Dalam *fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan dan menjadi jiwa perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Namun seperti halnya sebuah prinsip, *fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundangan-perundangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalagunaan lembaga peradilan (*litigation abuse*). Di antaranya adalah penyalagunaan ketidakefisien lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang harus membayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.

2. *Diclosure and Tranparancy (Transparansi)*

Transparansi bisa di artikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan

dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen. Sistem ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standart akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.

3. *Accountability (Akuntabilitas)*

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban yang ada pada perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan indonesia adalah merangkapnya sangsi pengawasan dewan komisaris. Atau justru sebaliknya, komisaris utama mengambil peran wewenang yang seharusnya dijalankan direksi. Padahal, diperlakukan kejelasan tugas serta fungsi yang ada dalam perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan dalam mengelola perusahaan.

Bila prinsip *Accountability* diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

4. *Responsibilities (Responsibilitas)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan-perundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat. Beberapa contoh mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kebijakan sebuah perusahaan makanan untuk mendapat sertifikat “HALAL”. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dari sisi pemerintah, perusahaan telah mematuhi peraturan undangan yang berlaku.
- Kebijakan perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang ke tempat umum, ini merupakan pertanggungjawaban kepada publik. Dari sisi masyarakat, kebijakan ini menjamin mereka untuk hidup layak tanpa merasa terancam kesehatannya

tercemar. Demikian tersebut merupakan bentuk jaminan kelangsungan usaha karena akan mendapat dukungan pengamanan dari masyarakat sekitar lingkungan (www.madani-ri.com).

5. *Independency (independensi)*

Independensi merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Tjager; 2003 dalam Mintara; 2008).

2.2.2.2 Manfaat Mekanisme *Corporate Governance*

Esensi *Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholder dan pemangku kepentingan lainnya. *Corporate Governance* memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme yang baik di dalam perusahaan.

2.2.3 Hipotesis

2.2.3.1 Pengaruh Kesempatan Investasi terhadap Kualitas Implementasi Corporatae Governance

Dalam kaitannya dengan kesempatan investasi/pertumbuhan, perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi akan senantiasa melakukan ekspansi dan dengan demikian, akan semakin membutuhkan dana eksternal. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas praktik *Corporate Governance* untuk mempermudah didapatkannya dana eksternal dan menurunkan biaya modal.

Penjelasan lainnya disampaikan oleh Gillan (2003) yang menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi, akan memiliki kesempatan untuk melakukan diskresi/ekspropriasi yang lebih besar dalam pemilihan proyek, dibandingkan manajer dalam perusahaan yang kesempatan investasinya kurang. Dengan demikian, dalam perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi membutuhkan kualitas *Corporate Governace* yang lebih baik.

Kebutuhan akan *Corporate Governance* yang berkualitas pada perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi juga dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Kim (2003) menjelaskan bahwa pada saat kesempatan investasi lebih menguntungkan, *return* atas investasi dari para pemegang saham pengendali akan lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang mereka dapat jika melakukan diskresi terhadap sumber daya perusahaan sehingga akan menerapkan praktik *Corporate Governance* yang lebih berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian pertama yang dikembangkan adalah:

H1 : *kesempatan investasi berpengaruh terhadap kualitas implementasi Corporate Governance*

2.2.3.2 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kualitas Corporate Governance

Beberapa literatur telah menunjukkan adanya hubungan antara konsentrasi kepemilikan dengan kualitas *Good Corporate Governance* suatu perusahaan. Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa manajer perusahaan yang tingkat kepemilikannya terhadap perusahaan tersebut tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan diskresi terhadap sumber daya perusahaan akan berkurang. Shleifer dan Wolfenzon (2003) dalam Durnev dan Kim (2003) menyatakan bahwa dengan lemahnya sistem hukum/proteksi terhadap investor, maka konsentrasi kepemilikan menjadi alat yang lebih penting untuk mengatasi masalah-masalah keagenan.

Dalam Drobetz (2004) menyatakan bahwa terdapat dua dampak utama dari besarnya saham yang dimiliki oleh pihak tertentu. Pertama, dengan meningkatnya hak atas aliran kas dari pemegang saham terbesar, maka akan menimbulkan dampak positif. Dengan demikian, para pemegang saham tersebut akan memiliki insentif dalam meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* perusahaan yang bersangkutan. Pandangan kedua, merupakan kebalikan dari pandangan pertama. Dengan semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, maka

pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan dan semakin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Para pemegang saham tersebut berpendapat bahwa bukan menjadi kepentingan mereka lagi mengenai perlunya perlindungan kepada pemegang saham minoritas, perlunya transparansi dan beberapa mekanisme *Corporate Governance* yang lainnya yang merupakan komponen dari pemingkat *Corporate Governance*.

Dengan adanya beberapa pendapat yang berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas *Corporate Governance* maka hipotesis penelitian kedua yang dapat dikembangkan adalah :

H2: *Konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas corporate governanc*

2.2.3.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

Profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Apabila perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Informasi ini digunakan untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut. Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan ditandai dengan meningkatnya jumlah dan banyaknya pemangku kepentingan yang mempercayakan sebagian hartanya untuk disertakan dalam modal

perusahaan. Bertambahnya sumber pendanaan ini akan memacu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan akan cenderung naik.

Pada praktiknya, peningkatan jumlah dan ragam pemangku harus disertai dengan pengungkapan informasi, khususnya informasi mengenai *Corporate Governance* sebagai tanggung jawab atas penggunaan dana pemangku kepentingan oleh perusahaan. Dengan laporan informasi *Corporate Governance* yang memiliki kualitas yang tinggi, maka pemangku kepentingan akan semakin yakin dengan cara yang ditempuh oleh manajemen. Cara-cara yang dimaksud adalah cara-cara yang memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*), tidak hanya berdasarkan kepentingan perusahaan saja. Dengan demikian, kenaikan profitabilitas akan menyebabkan kecenderungan kenaikan tingkat pengungkapan laporan informasi *Corporate Governance*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: *Profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas corporate governance*

2.2.3.4 Pengaruh Klasifikasi Industri Terhadap implementasi kualitas *Corporate Governance*

Wallace *et al.* (1994) mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan memiliki kecenderungan berbeda antara industri yang berbeda pula, hal ini menggambarkan keunikan karakteristik yang mereka miliki. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Aljifri dan Hussainey (2007) yang menyatakan bahwa sektor-sektor industri yang

ada akan mengadopsi kebijakan, pengukuran, dan penilaian akuntansi serta teknik pengungkapan yang berbeda dan hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam tingkat pengungkapan.

Sektor industri yang berbeda juga menyebabkan perbedaan ragam dan jumlah pemangku kepentingan, sehingga perusahaan akan cenderung memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan luas pengungkapan antar sektor industri yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Klasifikasi Industri berpengaruh terhadap Corporate Governance

2.2.4 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini akan di uji pengaruh variable (X) independent yaitu kesempatan investasi, Konsetrasi kepemilikan, profitabilitas dan klasifikasi industri dengan varibel dependen yang terikat (Y) yaitu kualitas *Good Corporate Governance*. Berikut diagram kerangkanya:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



